

Implementasi kebijakan pembentukan daerah otonom baru : Pengaruh kebijakan, organisasi dan lingkungan terhadap keberhasilan daerah otonom baru di Provinsi Gorontalo

Tarigan, Antonius, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20461057&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Pemekaran wilayah merupakan trend baru yang mengiringi implementasi kebijakan pembentukan daerah otonom baru dan sebagai salah satu jawaban atas berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Implementasi kebijakan tersebut mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, persoalan pelik muncul dalam implementasi kebijakannya karena kepentingan yang melatarbelakangi pemekaran wilayah seringkali tidak jelas apakah berupa kepentingan jangka panjang yang konstruktif atau kepentingan jangka pendek yang justru destruktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor kebijakan, organisasi dan lingkungan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru. Kemudian, untuk menggambarkan model persamaan struktural hubungan yang sesuai antara' ketiga faktor determinan tersebut dan pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dan desain evaluasi implementasi kebijakan. Unit analisisnya ialah pegawai yang mewakili organisasi pemerintah daerah otonom baru di Propinsi Gorontalo. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, angket dan wawancara mendalam. Data yang terkumpul dan dianalisis dengan menggunakan SEM {Structural Equation Modeling) dan dengan memakai perangkat lunak LISREL {Linear Structural Relationship).

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru diukur berdasarkan pemenuhan tujuh prakondisi daerah otonom: lembaga perwakilan yang mendukung terciptanya iklim demokrasi dan pembelajaran politik rakyat berbasis partisipasi masyarakat lokal; manajemen urusan daerah dilakukan secara optimal; kelembagaan pemerintah daerah terbangun berdasarkan kewenangan, kebutuhan^ kemampuan yang dimiliki; supervisi dan monitoring dilakukan sebagai dasar penilaian hasil pembangunan daerah; manajemen pelayanan publik dasar yang terlaksana secara efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel; tersedia personalia yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran tugas pemerintah daerah dan tersedia sumber keuangan yang cukup untuk membiayai pembangunan daerah.

Kebijakan, organisasi dan lingkungan implementasi kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru. Kebijakan diukur oleh aspek kesesuaian tujuan kebijakan, konsistensi dan kejelasan isi kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, efektivitas penyampaian

dan perubahan yang ten'adi melalui implementasi kebijakan. Kemudian, organisasi diwakili oleh adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas untuk dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah; kegiatan intra dan antar unit organisasi pemerintah daerah terkoordinasi dan sinkron satu sama lain; adanya struktur organisasi yang mewadahi dan mencirikan dinamika kegiatan yang dilakukan; sistem kepegawaian yang didasarkan pada kecakapan dan keahlian; sistem kompensasi yang berbasis kinerja serta tersedia sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas pemerintah. Kemudian, lingkungan diwakili oleh aspek kerjasama antar lembaga secara horizontal dan vertikal; hubungan sosial yang solid; budaya organisasi sebagai perekat yang menyatukan langkah pemerintah daerah; aspek politik lokal yang berciri demokratis berbasis partisipasi masyarakat; potensi sumber daya alam yang dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan daerah; kepemimpinan berdasarkan hati nurani dan partisipasi lembaga mitra untuk memacu akselerasi pembangunan daerah. Selanjutnya, pemodelan persamaan struktural hubungan antara faktor kebijakan, organisasi dan lingkungan serta pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru menunjukkan nilai probabilitas signifikansi 0,99943 ($p > 0.05$). Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara matriks kovarian model teoritik dengan matriks kovarian data. Implikasi teoritis penelitian ini menguatkan perpaduan elemen dalam model implementasi kebijakan sebagai proses politik dan administrasi, model kesesuaian, model linier dan model interaktif. Efek sinergisnya, terdapat dimensi baru bernama "dimensi infrastruktur" implementasi kebijakan yang sekaligus menguatkan konstruksi model deskriptif sistem determinan implementasi kebijakan yang dihasilkan. Tiga dimensi dalam model sistem determinan implementasi kebijakan melengkapi dimensi model implementasi kebijakan yang ada, khususnya terhadap model proses politik dan administrasi yang hanya meliputi dimensi isi kebijakan dan dimensi konteks implementasi. Secara metodologis, penelitian ini mendukung kesesuaian aplikasi pendekatan analisis pemodelan persamaan struktural dalam menjelaskan pengaruh kebijakan, organisasi dan lingkungan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru. Keberhasilan tersebut didasarkan pada pemenuhan prakondisi daerah otonom menjadi fondasi untuk menerapkan konsep pemerintahan yang berwirausaha berbasis inovasi kelembagaan.

Berdasarkan konstruk teoritis (tesis) dan realitas di lapang (anti tesis) diperoleh hasil analisis faktor konfirmatori (sintesis) pemikiran ilmiah mengenai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom yang didukung dengan infrastruktur yang kondusif bagi pelaksanaan kebijakan dalam konteks pemerintah daerah. Keberhasilan tersebut didasarkan pada pemenuhan ketujuh prakondisinya yang dipengaruhi oleh faktor yang saling berhubungan antara isi (kebijakan), infrastruktur (organisasi) dan konteks (lingkungan) implementasi kebijakan. Implikasi kebijakannya adalah stakeholders kebijakan perlu mencermati kondisi aktual daerahnya agar sinyalemen bahwa pemekaran sebagai derita bagi sang induk dan nestapa bagi rakyat miskin di daerah otonom baru tidak menjadi pengalaman buruk yang berulang hanya

untuk kepentingan politik atau ajang perburuan jabatan bagi pihak tertentu di daerah.

<hr>

ABSTRACT

"Regional Pemekaran" (proliferation of the regions) is a new trend that conveyed implementation policy of establishment new regional autonomy and it also answered various problems appeared in administering the local government in Indonesia. Implementation policy mentioned has been directed on ultimate cause, which efforts to improve people welfare. Nevertheless, often times obstacles set to emerge in implementing the policy due to interests in relevance to the motif of Regional Pemekaran would be intended for constructive long term objectives or merely temporarily yet unpopular. This research aimed to analyze the influence factor of policy, organization, and environment on successful in administering the new regional autonomy. Furthermore, the research also design a model equation on structural relation between said three determined factors and its influence on successful to oversee the new regional government.

This study conducted based on quantitative analysis method and design evaluation on implementing policy. The unit analysis was represented by employee in the organization of new local autonomy government in Gorontalo Province. Data gathered was using observation technique, questionnaire, and in-depth interview. Data collected was then analyzed with SEM (Structural Equation Modelling) and availed by LISREL (Linear Structural Relationship) instrument.

Successful administering the new regional autonomy government measured by completing seven regional autonomy pre-requisites, namely: representative institution in support to establish democracy climate and lessons learnt society based on civic local participatory, optimized regional management for internal affair, institutionalized local government based on authority, need, and capacity, supervision and monitoring as a base tool to assess regional development, management for public service delivery implied effectively, efficiently, economically, and accountable, competent personnel to support the administer local government, and availability funding for regional development.

Policy, organization, and environment to implement the policy have been positively influenced and significant on successful overseeing new autonomy of regional government. Policy represented by relevant aspect on objective policy, consistency and clarity of policy, output for beneficiary, effectivity in processing and adjustment that occurred through implementation of the policy. In addition, organization represented by main task and clear function to be implemented by regional government institution; intra activity and inter unit organization of local government coordinated and synchronized between another. Availability of organization structure that coping and characterized their dynamic activity; personnel system based on competencies; compensation system based on performance and availability infrastructure that support the tasks for the government. Moreover, environment embodied by aspect of cooperation between institution in horizontal and

vertical; solid social relation, organization culture to reunite into vision of local government. Local political aspect characterized by democratize based on civil participation. Cultivated potential of natural resource for local purpose. Additionally, modeling equation relationship between factor policy, organization, and environment and its influence on successful managing new autonomy local government has shown probability significant value 0.99943 ($p > 0.05$). This means that there were no significant differences between matrix Covarian theoretical model and Covarian matrix data.

Theoretical implication from the research strengthened combination element in model implementation policy as political and administration process, relevance model, linier model, and interactive model. And its synergize effect, accessibility of new dimension with so called " infrastructure dimension" implementation policy that apparently strengthening the descriptive model determined system as a result of implementation policy findings. Three dimension in system model determining policy implementation complemented on current model implementation policy, especially political and administration process model that only covered the dimension of policy content and dimension of policy context. Methodologically, this research supported relevant application on approach to analyze modeling structure in explaining policy influence, organization, and environment for successful administering new autonomy regional government. Successful mentioned above were basically due to fulfillment of prerequisites of new regional autonomy as foundation to imply a concept of entrepreneurial government based on institutional innovation.

Based on theoretical construct (thesis) and reality (anti thesis) obtained the result of confirmatory analytical factor (synthesis) research on successful administering regional autonomy government supported by conducive infrastructure for policy implementation in regional government context. Implication of the policy that policy stakeholders need to assess actual local condition in order to detect that pemekaran caused suffer for holding and misery for poor people in new regional autonomy would not duplicate as bad experience only for politic interest or chasing position for certain parties in the region.